



**Journal of Government Science Studies**  
 Available online at <https://ojs3.unpatti.ac.id/>  
 Vol. 2 No. 1, April 2023, pages: 22-30  
 e-ISSN: 2827-847X, p-ISSN: 2827-8461  
<https://doi.org/10.53730>



## Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka

Sudarcun, <sup>a</sup>, Zakiyudin Fikri <sup>b</sup>, Marlina <sup>c</sup>

Correspondence Email: [zakiyudinfikri04@gmail.com](mailto:zakiyudinfikri04@gmail.com)

Manuscript submitted: 29-01-2022, Manuscript revised: 10-02-2023, Accepted for publication: 27-04-2023

### Keyword:

Motor Vehicle Tax Realization;  
 Locally-generated revenue;

**Abstract:** This study aims to determine the effect of the realization of Motorized Vehicle Tax (PKB) and Motor Vehicle Transfer Fee (BBN-KB) on the local revenue of Bangka Regency. The research method used is quantitative research with an associative approach. The data used is primary data obtained from data on the realization of Motor Vehicle Tax and Motor Vehicle Transfer Fee as well as the realization of regional original revenues for Bangka Regency. The test results terminated by the R-squared value of 0.994 (99.4%), which means that the variables X1 (Motor Vehicle Tax) and X2 (Motor Vehicle Title Transfer Fee) affect the Y variable (local original income) by 99.4%, the remaining 1.6% influenced by other variables not included in the model. The conclusion is that the realization of motor vehicle transfer fees has a significant effect on local revenue in Bangka Regency..

### Kata Kunci:

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor; Pendapatan Asli Daerah;

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data yang digunakan yaitu data primer yang didapatkan dari data realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Bangka. Hasil uji diterminasi nilai R- squared 0,994 (99,4%) yang berarti variabel X1 (Pajak Kendaraan Bermotor ) dan X2 (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) mempengaruhi variabel Y (pendapatan asli daerah) sebesar 99,4 % sisanya 1,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Kesimpulan bahwa realisasi pajak kendaran bermotor dan bea balik nama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bangka.

<sup>a b c</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pahlawan 12, Indonesia

Sudarcun., Fikri, Z., & Marlina. (2023). Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangka. *Journal of Government Science Studies*, 1(2).

## 1 Pendahuluan

Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dengan adanya peraturan tersebut membuat kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengatur pajak dan retribusi daerah, meningkatkan penyediaan jasa layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberi kepastian hukum untuk masyarakat. Potensi penerimaan pendapatan yang bersumber dari pajak memiliki peran yang besar karena pajak merupakan sumber pendapatan terbesar yang dimiliki oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai masalah membiayai aktivitas pemerintahan dalam pembangunan daerah serta kepentingan masyarakat.

Pengenaan pajak di Indonesia berdasarkan tingkat pemerintahannya terbagi menjadi dua bagian yaitu pajak negara dan pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang atau pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, atau dapat juga diartikan pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintahan daerah tersebut. (Azhari, 2013). Temuan Hajuan (2022), perlu adanya lembaga yang transparansi, profesional dan sesuai prosedural dalam melakukan pelayanan (Hajuan, 2022), pemanfaatan teknologi informasi dalam melayani pelayanan publik (Ekram, Tuanaya, Wance, 2022).

Untuk merealisasikan pembangunan daerah yang merata, membutuhkan dana yang cukup besar, dana tersebut bisa berasal dari pinjaman luar negeri, sektor migas maupun non migas. Selain pinjaman luar negeri dan migas maupun non migas, ketersediaan dana daerah dapat diperoleh dari sektor pajak. Untuk memperlancar pembangunan daerah maka diperlukannya suatu dana yang berasal dari penerimaan pajak daerah. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dikatakan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain, pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan perda, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan juga peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, pajak daerah dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu : pajak provinsi dan pajak kabupaten. pajak provinsi, terdiri dari (Azhari, 2013).

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan
5. Pajak rokok

Jenis pajak-pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemerintah melalui pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan dimana suatu tindakan yang dilakukan oleh negara guna menertibkan para wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu. Wilayah Kabupaten Bangka dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan. Tetapi dibalik peningkatan jumlah kepemilikan

kendaraan bermotor tersebut, banyak juga terdapat tunggakan-tunggakan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, tentunya hal ini sangat mempengaruhi besaran realisasi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Bangka Belitung. Sehingga Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seringkali mengadakan pemutihan dan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor maupun bea balik nama setiap tahunnya. Hal ini dimaksudkan agar meringankan beban pajak bagi wajib pajak terhadap tunggakan-tunggakan tersebut. Akan tetapi meskipun hal tersebut sering dilakukan, masih saja banyak terdapat tunggakan-tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut.

Berdasarkan data bahwa tunggakan pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Bangka mengalami peningkatan dari tahun ketahun terutama pada kendaraan roda empat sedangkan pada kendaraan roda dua pada tahun 2020 mengalami penurunan setelah mengalami peningkatan pada tahun 2017 sampai dengan 2019. Atas pemasalah diatas maka penulis tertarik ingin melakukan penelitian secara mendalam terkait pengaruh pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pendapatan daerah merupakan penerimaan daerah yang sangat penting bagi penerimaan daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai segala macam dari tujuan pemerintah baik jangka panjang maupun jangka pendek. (Azhari, 2015).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang selanjutnya disebut PAD yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Jadi, pendapatan asli daerah merupakan modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai keperluan belanja daerah dan pembangunan daerah. Besar kecilnya PAD bagi suatu daerah tergantung pada instrument umumnya yaitu pajak daerah dan retribusi daerah yang juga sangat tergantung pada perkembangan perekonomian di daerah bersangkutan.

Menurut Andriani, (2017) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No.28, 2009).

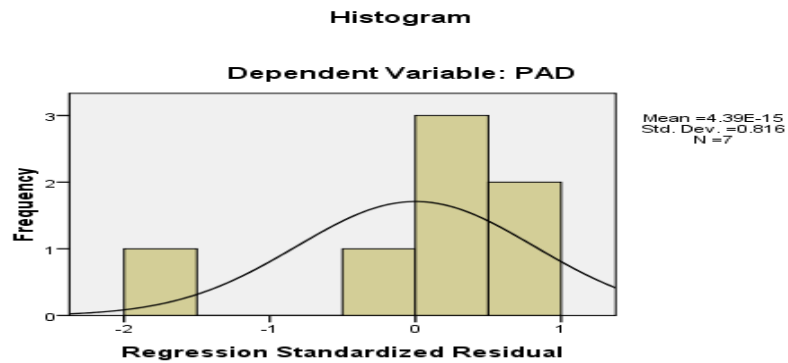
Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Permendagri No 1, 2021). Objek pajak kendaraan bermotor merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan subjek pajak kendaraan bermotor merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

## 2 Metode Penelitian

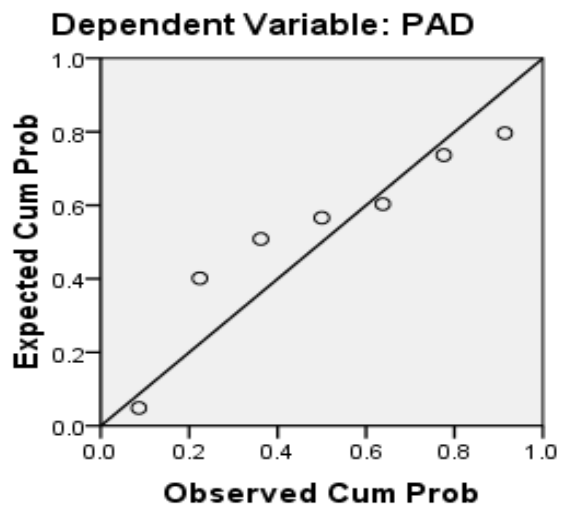
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sumber data menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu UPT Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka terkait data realisasi PKB, BBN-KB DAN PAD. Teknik analisis data yang digunakan yaitu uji asumsi klasik dan uji hipotesis (ujian t, ujian f dan uji ditemniasi R2).

### 3 Hasil dan Diskusi

#### Hasil Uji Normalitas



#### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa grafik histogram membentuk gambar seperti lonceng. Hal ini membuktikan bahwa data penelitian berdistribusi normal dan layak untuk digunakan meskipun ada sedikit kemiringan. Begitu juga dengan gambar 4.2 *normal probability plot* menunjukkan bahwa terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

## Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-5367.538	5428.418		-.989	.379		
PKB	1.165	.153	.325	7.611	.002	.823	1.216
BBN-KB	1.012	.053	.815	19.075	.000	.823	1.216

Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 dan ilai VIF yang lebih dari 10. Maka mengacu kepada dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolineritas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolineritas dalam model regresi.

## Hasil Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi sebagai berikut;

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.997 <sup>a</sup>	.994	.991	1164.578	1.977

a. Predictors: (Constant), BBN-KB, PKB

b. Dependent Variable: PAD

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai durbin watson yaitu sebesar 1.977 yang mana nilai tersebut lebih besar dari batas atas (du) 1.8964 dan kurang dari nilai (4-du) yaitu sebesar 2.1036. maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

## Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual atau pengamatan yang lain

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3315.011	2841.132		1.167	.308
PKB	-.043	.080	-.221	-.531	.624
BBN-KB	-.035	.028	-.530	-1.271	.273

a. Dependent Variable: RES2

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas atau signifikansi. X1 sebesar 0.624 lebih besar dari (5%) atau 0.05. maka dapat disimpulkan tidak mengindikasikan mengandung heteroskedastisitas. Begitupun dengan nilai probabilitas atau signifikansi pada X2 memperoleh nilai sebesar 0,273 lebih besar (5%) atau 0.05. maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel X2 tidak mengandung masalah heteroskedastisitas dan lolos uji park.

**Hasil Uji Hipotesis**

Analisis regresi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Uji hipotesis yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji t (parsial), Uji f (simultan) dan uji koefisien determinan. Hasil pengujian sebagai berikut;

**Hasil Uji t (parsial )**

Uji t (parsial) pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh parsial (sendiri) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Hasil uji t (parsial) sebagai berikut;

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant )	-5367.538	5428.418		-.989	.379
PKB	1.165	.153	.325	7.611	.002
BBN-KB	1.012	.053	.815	19.075	.000

a. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Variabel X1 (Pajak Kendaraan Bermotor) memperoleh nilai Prob atau signifikansi sebesar 0.002 lebih kecil dari 0.05 atau <5%. maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 (Pajak Kendaraan Bermotor) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y (Pendapatan Asli Daerah). Dengan demikian uji hipotesis yang pertama (H1) yang berbunyi terdapat pengaruh positif antara variabel X1 (Pajak Kendaraan Bermotor) terhadap variabel Y (Pendapatan Asli Daerah) dapat diterima. Kemudian Variabel X2

(Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) memperoleh nilai signifikansi atau Prob sebesar 0.000 lebih kecil dari  $< 0,05$  (5%) maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y (Pendapatan Asli Daerah). Dengan demikian uji hipotesis (H2) yang kedua yang berbunyi terdapat pengaruh positif antara variabel X2 (Bea Balik Nama-Kendaraan Bermotor) terhadap variabel Y (Pendapatan Asli Daerah) dapat diterima

### Hasil Uji F (Simultan )

Uji F (Simultan) pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan (bersamaan) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Hasil uji F (Simultan) sebagai berikut;

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8.972E8	2	4.486E8	330.749	.000 <sup>a</sup>
	Residual	5424964.643	4	1356241.161		
	Total	9.026E8	6			

a. Predictors: (Constant), BBN-KB, PKB

b. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel output spss diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y yaitu sebesar 0.000 lebih kecil dari  $< 0.05$  dan nilai F hitung sebesar 330.749 lebih besar  $>$  dari F tabel 5.75. sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang artinya terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan (bersamaan) terhadap Y (Pendapatan Asli Daerah).

### Hasil Uji Koefisien Diterminan

Uji koefisien diterminan pada penelitian ini digunakan untuk melihat atau mengukur seberapa besar variabel X1 dan X2 menjelaskan variabel dependen atau variabel Y. Hasil uji Koefisien diterminan sebagai berikut;

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.997 <sup>a</sup>	.994	.991	1164.578	1.977

a. Predictors: (Constant), BBN-KB, PKB

b. Dependent Variable: PAD

Berdasarkan tabel output spss diatas dapat diketahui bahwa nilai R- squared 0,994 (99,4) yang berarti variabel X1 (Pajak Kendaraan Bermotor) dan X2 (bea balik nama kendaraan bermotor) mempengaruhi variabel Y (pendapatan asli daerah) sebesar 99,4 % sisanya 1,6 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Model regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = -5367.538 + 1.165 X_1 + 1.012 (X_2) + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut bahwa

1. Nilai konstanta yang dihasilkan sebesar -5367.538, menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan, maka rata-rata tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -5367.538.
2. Koefisien regresi Pajak Kendaraan Bermotor (X1) yang dihasilkan sebesar 1.165, menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan pajak kendaraan bermotor sebesar 1% maka akan diikuti dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah 11.65%.
3. Koefisien regresi bea balik nama kendaraan bermotor (X2) yang dihasilkan sebesar 1.012, menyatakan bahwa setiap terjadi pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 1%, maka tidak akan diikuti kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 10.12%.

#### 4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bangka pada tahun 2015-2021, karena terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi di Kabupaten Bangka. Begitu juga secara parsial Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bangka pada tahun 2015-2021, karena besarnya penerimaan BBNKB tergantung pada transaksi jual beli motor bekas sehingga BBNKB juga memiliki pengaruh secara signifikan terhadap PAD meskipun jumlah realisasi BBN-KB lebih kecil daripada jumlah realisasi PKB. Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bangka tahun 2015-2021, hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor setiap tahunnya meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebagai akibat adanya pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2021 jumlah kendaraan bermotor kembali mengalami peningkatan.

#### Referensi

- Azhari Aziz Samudra, (2015). Perpajakan di Indonesia Keuangan, pajak dan retribusi daerah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Dergibson Siagian dan Sugiarto, (2006) "Metode Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi", (Jakarta: PT Gramdia Pustaka Utama,) h.2
- Ekram, I., Tuanaya, W., & Wance, M. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Publik Kantor Manunggal Satu Atap Provinsi Maluku. *Journal of Governance*



- and Social Policy*, 3(1), 1-13.
- Hayati, S. (2018) Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Provinsi Lampung Tahun 2011–2016 (Studi Analisis Pada Badan Pendapatan Daerah Di Provinsi Lampung. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Hajuan, A. (2022). Efektivitas Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) Pada Polisi Resor Kota Ternate. *Journal of Government Science Studies*, 1(1), 01-08.
- Modul Ekonometrika Analisis dan Pengolahan Data Dengan SPSS dan EVIEWS, h. 15
- Ningsih, S. W. (2015). Pengaruh pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi jawa tengah. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Saputra, E. (2019). (Studi pada Provinsi Bangka Belitung Tahun 2010 – 2019)', 3(3), pp. 134–144.
- Septiani, P. (2020). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Sugiyono, (2011). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,) h.8
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah.
- Peraturan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Wiratna Sujarweni (2015). Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi, (Yogyakarta: Pustaka Buana Press), h.157